

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif dan akuntabel. Suatu daerah dapat maju dan berkembang, jika dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas yang tinggi dan penerapan *value for money* yang benar. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom sanggup berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi seminimal mungkin. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pusat merumuskan kebijakan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur penduduknya sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri utama yang dapat dilakukan daerah otonom dalam menunjukkan kemampuannya terletak pada potensi keuangan daerahnya. Oleh karena itu, PAD wajib menjadi bagian dari sumber keuangan terbesar yang didukung oleh peraturan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai syarat fundamental sistem pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali potensi yang ada di daerah yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat berkurang. Tingkat ketergantungan daerah diukur dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah, seperti belanja operasional maupun belanja modal. Semakin banyak kebutuhan belanja yang terpenuhi dengan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, begitupun sebaliknya, semakin sedikit kebutuhan belanja yang dapat terpenuhi, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Suatu daerah akan dikatakan efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah apabila presentase rasionya minimal mencapai 1%. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan

realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka kemampuan daerah tersebut semakin baik.

Selain itu, anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah sehingga belanja modal perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Ketidakstabilan keuangan tiap daerah di Indonesia mendorong pemerintah pusat untuk mengambil peran dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi dan tercapainya standar pelayanan publik pemerintah di setiap daerah di Indonesia melalui APBD. Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk membiayai pengeluaran belanja daerah atas implementasi desentralisasi yang diwujudkan pada alokasi dana perimbangan di semua daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Secara umum, pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dalam anggaran belanja dikelompokkan menjadi lima yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

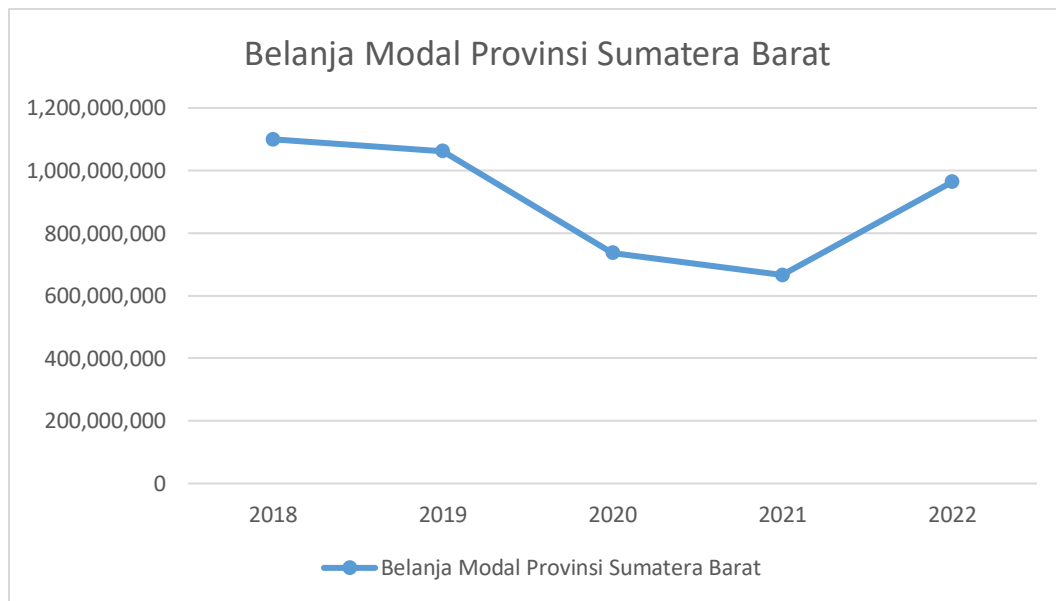
Pemerintah daerah di Indonesia sering mendapat masalah terkait dengan kinerja keuangannya adalah rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Salah satunya terjadi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang ada dipulau Sumatera dengan posisi geografis yang menguntungkan. Secara administratif Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 (dua belas) Pemerintah Kabupaten dan 7 (tujuh) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Masing – masing sumber keuangan atau Pendapatan daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi APBD berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sebagai besar masyarakat Provinsi Sumatera Barat sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal guna menambah aset tetap daerah tersebut. Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk

mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal juga dapat diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPBN) Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Mencatat, realisasi belanja dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) di Provinsi Sumatera Barat masih terbilang rendah. Dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan, 46,87% terserap ke belanja pegawai, belanja barang 43,29% dan 29,11% ke belanja modal. Dengan demikian, kinerja yang perlu ditingkatkan dalam hal belanja modal yaitu pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur. Hal ini dikarenakan belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. (sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, 2023).

Dibawah ini akan disajikan grafik pergerakan Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Total Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari grafik diatas dapat kita ketahui bahwa Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tetapi ditahun 2022 mengalami Peningkatan. Pada tahun 2018 Total Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 1.099.701.408, ditahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.062.230.453, ditahun 2020 juga mengalami penurunan lebih banyak dari tahun sebelumnya sebesar Rp 736.888.360, ditahun 2021 sama hal nya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 666.352.120, dan untuk ditahun 2022 Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat Mengalami peningkatan sebesar Rp 963.928.502. Total Belanja Modal dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset. Dimana manfaat ini akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas terhadap belanja modal, memberikan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian Hadi, dkk (2023) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi menyatakan bahwa tidak berpengaruh dan tidak mampu memoderasi PAD tidak terhadap alokasi Belanja Modal, Dana Perimbangan menyatakan jika DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian Muzaki, dkk (2022), adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi tidak memiliki pengaruh bagi Belanja Modal pada Pemda Tulungagung periode 2015 – 2021. Hasil dari penelitian Mulyani, dkk (2023), adalah Rasio derajat desentralisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya pendapatan asli daerah yang diterima, didukung dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah mengupayakan peningkatana aloaksi belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasaran kebutuhan masyarakat. Peningkatan alokasi belanja modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hasil dari penelitian Wilujeng (2023), adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Modal dengan Positif. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai belanja modal yang mengalami perubahan dan hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, Skripsi ini diberi judul **“Pengaruh Rasio Kemandirian, Ketergantungan, dan Efektivitas Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Sumatera Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan penulis bahas untuk Skripsi ini adalah:

1. Apakah rasio kemandirian berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota se – Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah rasio ketergantungan berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota se – Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah rasio efektivitas berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota se – Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas, berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal kabupaten/kota se – Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi masalah rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio efektivitas terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan ialah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh rasio kemandirian secara parsial terhadap belanja modal pada kabupaten/kota diProvinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh rasio ketergantungan secara parsial terhadap belanja modal pada kabupaten/kota diProvinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh rasio efektivitas secara parsial terhadap belanja modal pada kabupaten/kota diProvinsi Sumatera Barat.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio efektivitas secara simultan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota diProvinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan perbandingan dengan teori – teori yang didapat diperkuliahan khususnya mengenai kinerja (rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio efektivitas) terhadap belanja modal.
2. Bagi Entitas Pemerintah
Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.
3. Bagi Lembaga Polsri
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya dijurusan Akuntansi.